

**LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO
TAHUN 2026**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, laporan penilaian risiko Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026 ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan risiko yang lebih efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda.

Penilaian risiko ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi potensi risiko yang mungkin memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Bapenda pada tahun 2026. Dengan demikian, diharapkan hasil dari penilaian ini dapat memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan strategis dalam rangka mitigasi dan pengendalian risiko yang ada.

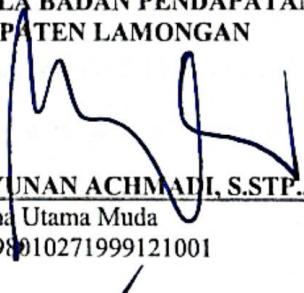
Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) mengacu kepada lima unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, dan pemantauan/monitoring. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian, atau pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktik tata kelola organisasi.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi positif dalam proses penyusunan laporan ini. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengelolaan dan peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik di masa yang akan datang.

Lamongan, 10 Maret 2026

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**


EDY YUNAN ACHMADI, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 198010271999121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manajemen risiko adalah proses perencanaan kegiatan yang dibuat untuk mengantisipasi terjadinya risiko organisasi termasuk adanya kegiatan indentifikasi, perencanaan, startegi, dan penilaian hal-hal negatif yang dapat terjadi. Penerapan manajemen risiko berpedoman pada konsep SPIP yang telah dilaksanakan dan terintegrasi dengan strategi manajemen. Proses atau fungsi manajemen resiko sering diterjemahkan dalam tiga langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen resiko diharapkan dapat membuat organisasi menjadi sadar resiko dan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan dengan tujuan agar organisasi dapat mengambil keputusan yang tepat dan optimal. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko, sehingga Organisasi Perangkat Daerah diharapkan mampu mengidentifikasi penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana kegiatan.

Oleh karena itu diperlukan penilaian atas resiko yang dimiliki sehingga dapat ditentukan tindakan preventif dan solutif terhadap resiko yang akan dihadapi sesuai dengan skala penilaian risiko.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Lampiran Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan penyusunan laporan penilaian risiko tahun 2026 bertujuan sebagai implementasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada unit kepatuhan sebagai sarana pemilik risiko dalam mencapai tujuan Organisasi Perangkat Daerah.

D. RUANG LINGKUP

Kegiatan Penilaian Risiko tahun 2026 di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan untuk mengetahui skala dampak dan intensitas terjadinya risiko yang sudah disusun terhadap pencapaian tugas dan tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

BAB II

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan selaku unsur pelaksana urusan pendapatan daerah di Kabupaten Lamongan telah menyusun register risiko OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah. Adapun risiko yang telah berhasil dikategorikan menjadi 2 yaitu risiko strategis dan operasional. Untuk dapat melihat nilai efektifitas dari pengendalian risiko yang telah direncanakan, maka dilakukan penilaian survei persepsi kepada seluruh pegawai mulai dari staf hingga pejabat eselon mengenai hasil penilaian pengendalian risiko pada unit kerja urusan keuangan. Hasil penilaian yang telah dilakukan yakni dalam penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, serta hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait telah memiliki hasil penilaian yang baik dan memadai baik dari hasil review dokumen maupun hasil survei persepsi. Kondisi lingkungan pengendalian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2026 berdasarkan pada dokumen hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern dapat dikategorikan memiliki nilai “memadai” sebagaimana tabel di bawah ini :

1. Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	Memadai		
2. Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	Memadai	
3. Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	Memadai

1. Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	Memadai
2.Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	2	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	Memadai
3. Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	Memadai
4. Pemda telah menginternalisasi budaya	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	Memadai

4. APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	Memadai
5. Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	Memadai	
HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																														MEMADAI												
1. Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	Memadai
2. Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	Memadai	

KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																														MEMADAI													
1. Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	Memadai						
2. Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	Memadai				
3. Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	Memadai		
4. Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	Memadai

3. Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	Memadai			
4. Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	Memadai	
5. Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	Memadai

6. Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	Memadai		
7. Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	Memadai
PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF																														MEMADAI										
1. Inspektoral Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program secara periodik	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	Memadai	

Simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian adalah sebagai berikut:

1. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA

Penegakan integritas dan penerapan nilai-nilai etika dalam organisasi telah mulai diterapkan namun kurang adanya penekanan melalui budaya dan sosialisasi yang memadai mengenai nilai-nilai integritas dan etika kerja.

2. KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI

Rapat dilaksanakan secara rutin dan akan dilaksanakan kegiatan bimtek atau diklat pajak namun belum meratanya partisipasi pegawai dalam program peningkatan kompetensi, terutama di tingkat pelaksana dan teknis.

3. KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF

Kepemimpinan dalam organisasi telah menciptakan suasana kerja yang cukup kondusif, ditandai dengan terbukanya komunikasi, adanya dukungan terhadap bawahan, serta terciptanya lingkungan kerja yang harmonis. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam hal pengambilan keputusan yang lebih responsif, pemberian arahan yang lebih strategis untuk mendorong semangat kerja.

4. PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

Struktur organisasi telah disusun selaras dengan proses bisnis yang berjalan, pola mutasi yang teratur. Namun, masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit, belum optimalnya alur koordinasi dan komunikasi lintas bagian, serta kurangnya fleksibilitas struktur dalam merespons perubahan.

5. PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah dilaksanakan secara tepat, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

6. PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SDM

Pelatihan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan strategis organisasi, rendahnya tindak lanjut dari hasil pembinaan juga menjadi hambatan.

7. PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF

Tim SPIP telah terbentuk sebagai bagian dari upaya penguatan pengendalian intern di lingkungan organisasi. Namun, efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal SDM kompeten dan bersertifikasi, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pengawasan, koordinasi, pelaksanaan monitoring.

8. HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT

Kerja sama dengan Instansi terkait sudah terjalin dengan baik, sekaligus kolaboratif. Namun, kolaboratif masih bersifat reaktif dan belum diarahkan pada pembentukan kemitraan strategis jangka panjang dan memberikan dampak yang luas.

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko pada tiap bulan tribulan, maupun tahunan. Pemantauan pengendalian risiko pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian risiko yang ada telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Guna mengatasi lingkungan pengendalian yang kurang memadai di atas maka diperlukan beberapa strategi rencana tindak pengendalian perbaikan terhadap lingkungan pengendalian sebagaimana tabel sebagai berikut :

Formulir Kertas Kerja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Pnyelesaian
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA			
	Penegakan integritas dan penerapan nilai-nilai etika dalam organisasi telah mulai diterapkan namun kurang adanya penekanan melalui budaya dan sosialisasi yang memadai mengenai nilai-nilai integritas dan etika kerja.	Membuat pamphlet dan promosi tentang kode etik dan memastikan saat mengadakan pelatihan tidak hanya saat orientasi, tetapi juga secara berkala melalui pelatihan dan workshop, serta dibuatkan budaya etika organisasi yang diulang-ulang.	Kepala Badan	Januari-Desember 2026
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI			
	Rapat dilaksanakan secara rutin dan akan dilaksanakan kegiatan bimtek atau diklat pajak namun belum meratanya partisipasi pegawai dalam program peningkatan kompetensi, terutama di tingkat pelaksana dan teknis.	Mengajak senior berpengalaman untuk menjadi narasumber internal secara bergilir, sistem peendampingan internal bisa dengan pegawai junior dibimbing senior, memberi penghargaan simbolik (seperti sertifikat, apresiasi dalam apel, piagam internal) kepada pegawai disiplin dan berkinerja baik, atasan menyampaikan pesan motivasi dan evaluasi kinerja	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Juli&Agustus 2026
3.	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF			

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Pnyelesaian
	<p>Kepemimpinan dalam organisasi telah menciptakan suasana kerja yang cukup kondusif, ditandai dengan terbukanya komunikasi, adanya dukungan terhadap bawahan, serta terciptanya lingkungan kerja yang harmonis. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam hal pengambilan keputusan yang lebih responsif, pemberian arahan yang lebih strategis untuk mendorong semangat kerja</p>	<p>Membuat sistem pengambilan keputusan yang lebih berbasis data agar keputusan yang diambil lebih tepat dan responsif, menyusun rencana strategis organisasi yang jelas, dengan tujuan yang terukur dan langkah-langkah yang rinci untuk mencapai tujuan tersebut, arahan pimpinan secara strategis disampaikan terarah, terbuka dan dipahami oleh seluruh staf</p>	<p>Kepala Badan dan Kepala Bidang-Bidang, Kepala Subbagian</p>	<p>Januari-Desember 2026</p>
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN			
	<p>Struktur organisasi telah disusun selaras dengan proses bisnis yang berjalan, pola mutasi yang teratur. Namun, masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit, belum optimalnya alur koordinasi dan komunikasi lintas bagian, serta kurangnya fleksibilitas struktur dalam merespons perubahan</p>	<p>Melakukan pemetaan yang jelas mengenai tugas dan fungsi masing-masing unit dalam organisasi, Menyusun media komunikasi yang jelas dan efektif (coffe morning, frekuensi rapat rutin, platform komunikasi yaitu WA, tele, dsb), Membuat sistem pengambilan keputusan yang memungkinkan fleksibilitas dalam merespons perubahan yang terjadi, dengan melibatkan lebih banyak pihak dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan keputusan yang diambil lebih cepat dan tepat sasaran.</p>	<p>Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian</p>	<p>Januari-Desember 2026</p>
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT			
	<p>Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah dilaksanakan secara tepat, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.</p>	<p>Membuat formulir laporan pelaksanaan tugas sederhana, dan melaporkan kemajuan dan hambatan dievaluasi secara berkala untuk didiskusikan dengan rekan kerja dan atasan.</p>	<p>Kepala Badan dan Kepala Bidang-Bidang, Kepala Subbagian</p>	

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Pnyelesaian
6	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM			
	Pelatihan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan strategis organisasi, rendahnya tindak lanjut dari hasil pembinaan juga menjadi hambatan.	Pembinaan non-formal yang menarik melalui coaching, mentoring, dan evaluasi kerja harian/mingguan, atasan memonitoring dampak pembinaan terhadap sikap/kinerja pegawai.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Kepala Badan dan Kepala Bidang-Bidang, Kepala Subbagian	Januari-Desember 2026
7	Perwujudan peran APIP yang efektif			
	Tim SPIP telah terbentuk sebagai bagian dari upaya penguatan pengendalian intern di lingkungan organisasi. Namun, efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal SDM kompeten dan bersertifikasi, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pengawasan,serta perlu peningkatan dalam koordinasi, pelaksanaan monitoring.	Membuat pelatihan-pelatihan auditor untuk pengawasan dan teknologi informasi, membuat sistem informasi untuk kegiatan pengawasan, melakukan pemantauan rutin terhadap implementasi rekomendasi hasil pengawasan.	Kepala Badan dan Kepala Bidang-Bidang, Kepala Subbagian	Maret, Juni, September, Desember 2026
8	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait			
	Kerja sama dengan Instansi terkait sudah terjalin dengan baik, sekaligus kolaboratif. Namun, kolaboratif masih bersifat reaktif dan belum	Mengadakan forum rutin untuk mempertemukan pimpinan dan anggota dari berbagai unit untuk mendiskusikan tantangan dan	Kepala Badan dan Kepala Bidang-Bidang, Kepala Subbagian	Januari-Desember 2026

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Pnyelesaian
	diarahkan pada pembentukan kemitraan strategis jangka panjang dan memberikan dampak yang luas	peluang kolaborasi, merancang program-program yang berorientasi pada hasil jangka panjang yang bermanfaat untuk kepentingan bersama agar tidak reaktif, seperti program pelatihan bersama, penelitian dan pengembangan (R&D), atau inisiatif berbasis teknolog, evaluasi kemajuan dari setiap program atau proyek kolaborasi		

BAB III

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Tujuan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan selaras dengan tujuan dalam RPJMD Kabupaten lamongan, dimana di dalam RPJMD Kabupaten Lamongan memiliki tujuan yaitu *"Terwujudnya reformasi birokrasi berdampak yang berorientasi layanan"*. Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan adalah untuk *"Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah"*. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Oleh karena itu guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029 maka ditetapkan sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, yang selaras dan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Kabupaten Lamongan yang dibagi menjadi 2 sasaran yaitu :

- 1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);**
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah.**

Badan Pendapatan Daerah memiliki 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah serta 8 kegiatan dan 38 Sub Kegiatan.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Berdasarkan pada hasil analisis penyusunan register resiko, maka dapat dijabarkan bahwa Badan Pendapatan Daerah sebagai pelaksana tugas menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan memiliki resiko yang berhasil dianalisis yang terbagi ke dalam resiko strategis dan resiko operasional sebagaimana matriks yang disajikan sebagai berikut :

Kertas Kerja Strategis Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda : Kabupaten Lamongan
 Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah
 Tahun Penilaian : 2026
 Periode yang dinilai : Januari s.d. Desember 2026
 Tujuan Strategis : Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	Tujuan: Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah Sasaran Strategis Perangkat Daerah: Meningkatnya	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan PAD	Perencanaan-Implementasi-Pengawasan dan Pemeriksaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum tercapai secara optimal	Petugas tidak mengoptimalkan pendataan, penagihan dan pengawasan serta pemeriksaan dalam menggali pajak daerah sehingga tunggakan	RSO.26.37.0 8.01	Kepala Badan	Potensi PAD belum tergali secara optimal	Eksternal & Internal	C	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah menurun	Pemerintah Daerah, Bapenda

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				menumpuk dan tidak tertagih pada jenis pajak tertentu							

**Kertas Kerja Risiko Operasional Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan**

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		C / U C	Dampak	
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.Persentase Ketetapan Pajak Daerah yang Sesuai 2.Jumlah Penambahan Objek Pajak Baru 3.Persentase Regulasi Pendukung Pajak Daerah yang Update 4.Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah melalui Kanal Digital 5.Persentase Wajib Pajak yang Menyelesaikan Piutang Pajak	Perencanaan-Implementasi-Pengawasan dan Pemeriksaan	Risiko operasional : Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi daerah tidak tercapai tepat waktu Risiko fraud : penurunan kepatuhan wajib pajak Risiko Kebijakan :Perubahan kebijakan perpajakan baik dari tingkat pusat maupun daerah	Pada akhir tahun anggaran, target penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak tercapai sesuai jadwal yang ditetapkan karena ketidakefektifan proses penagihan, pengawasan, kurangnya efektivitas sistem rekonsiliasi	ROO.26.37.08.01	Kepala Badan	Terjadinya penyelewengan pajak dan retribusi, atau kebocoran data yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pengelolaan pendapatan daerah, terjadinya perubahan regulasi	Internal dan Eksternal	C	Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah tidak mencapai target di akhir tahun	Pemerintah Daerah,Bapenda

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		C / U C	Dampak	
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j	k	l
		Daerah 6.Jumlah Obyek Pajak yang Diawasi dan Diperiksa 7.Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Data yang Dilaksanakan 8.Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang Dilaksanakan 7.			data, atau rendahnya kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan baru yang mengubah tarif pajak atau jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat secara tiba-tiba sehingga masyarakat dan pemerintah butuh waktu untuk			pajak pusat dan daerah				

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		C / U C	Dampak	
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j	k	l
					mengimplementasikannya							
2	Sub Kegiatan : Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pajak Daerah yang tersusun	Perencanaan	Risiko operasional : Belum tersusunnya kertas kerja proyeksi pendapatan Risiko Operasional : Ketidaksiharuan target pajak dengan kebijakan regulasi nasional Risiko operasional : belum adanya sistem informasi terkait	Kurang maksimalnya menggali potensi karena terbatasnya sdm	ROO.2 6.37.0 8.02	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Data wajib pajak belum terupdate, Regulasi nasional berubah cepat, keterbatasan anggaran IT	Internal	C	Tidak terdapat peningkatan dalam target pajak daerah	Pemerintah Daerah, Bapenda

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		C / U C	Dampak	
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j	k	l
				perencanaan pajak daerah								
3	Sub Kegiatan : Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen analisa potensi dan kebijakan pajak daerah yang tersusun	Perencanaan	Risiko operasional : data potensi pajak daerah tidak tersusun secara mutakhir Risiko Operasional : keterbatasan penyusunan / perubahan kebijakan pajak daerah dengan regulasi nasional Risiko Fraud : manipulasi data potensi/realisasi untuk	Petugas melakukan potensi pajak daerah tidak sesuai dilapangan	ROO.2 6.37.0 8.03	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Pemutakhiran database WP/objek pajak belum terjadwal, kurangnya pemahaman pemantauan tentang regulasi nasional beserta turunannya, kontrol internal lemah	Internal	C	Data potensi tidak terupdate	Pemerintah Daerah, Bapenda

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		C / U C	Dampak	
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j	k	l
				menaikkan target								
4	Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil penyuluhan pajak daerah yang tersusun	Implementasi	Risiko Operasional : Sarana-prasarana & media publikasi penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan kurang memadai Risiko Operasional : partisipasi wajib pajak rendah Risiko Fraud : manipulasi laporan realisasi kegiatan	Petugas melakukan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dengan tidak optimal	ROO.2 6.37.0 8.04	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Terbatasan sarana prasarana dan SDM pengelola media publikasi, rendahnya literasi wajib pajak, budaya integritas belum kuat	Internal dan Eksternal	C	Kebijakan pajak daerah tidak tersampaikan kepada seluruh wajib pajak	Pemerintah Daerah, Bapenda

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		C / U C	Dampak	
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j	k	l
5	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana prasarana pajak daerah yang tersedia	Implementasi	Risiko Operasional : sarana IT pengelolaan pajak tidak sesuai kebutuhan Risiko Operasional : sistem IT pengelolaan pajak eror Risiko Operasional : Keamanan sarpras dan data pendukung kurang memadai	Tidak mengelola peralatan dan sistem IT pengelolaan pajak dengan optimal	ROO.2 6.37.0 8.05	Kabid Pelayanan dan Penghasilan	Tidak membuat perencanaan SDM IT dan anggaran IT dengan tepat, kapasitas server dan jaringan tidak optimal, keamanan IT tidak lengkap	Internal	C	Sarana prasarana tidak digunakan secara optimal dan layanan pajak menjadi terhambat	Pemerintah Daerah
6	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah objek pajak yang telah didata dan dimutakhirkan	Implementasi	Risiko Operasional : ada objek pajak tidak teridentifikasi	Memanipulasi pendataan pajak daerah	ROO.2 6.37.0 8.06	Kabid Perencanaan	Petugas melakukan pendataan lapangan belum	Internal	C	Database objek pajak daerah dan subjek pajak	Pemerintah Daerah dan Bapenda

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		C / U C	Dampak	
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Risiko Operasional : keterbatasan sarana dan SDM pendataan Risiko Fraud : manipulasi data objek pajak			dan Penetapan	menyeluruh karena keterbatasan anggaran dan SDM, anggaran dan SDM pendataan terbatas, akses sistem tidak dibatasi sesuai peran			daerah tidak akurat	
7	Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Implementasi	Risiko Operasional : kehilangan data karena terserang virus Risiko Operasional : monitoring kualitas data tidak rutin Risiko Fraud : rekayasa	Keamanan Basis Data tidak terenkripsi secara baik	ROO.2 6.37.0 8.07	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Poteksi keamanan IT belum memadai, keterbatasan SDM pengelola data pajak daerah, budaya integritas	Internal	C	Data terkena serangan siber dan kesulitan menetapkan target pajak yang realistis	Pemerintah Daerah dan Bapenda

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		C / U C	Dampak	
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j	k	l
				laporan basis data pajak				dan sanksi belum tegas				
8	Sub Kegiatan : Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang telah dilakukan penilaian baik massal maupun individual	Implementasi	<p>Risiko Operasional : hasil penilaian NJOP tidak sesuai dengan harga pasar aktual</p> <p>Risiko Operasional: tidak adanya pembaruan zona nilai tanah secara rutin</p> <p>Risiko Fraud : kolusi petugas penilai dengan PPAT/Notaris dalam menentukan nilai objek</p>	Melakukan penilaian NJOP tidak sesuai dengan harga pasar aktual	ROO.2 6.37.0 8.08	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Survei lapangan tidak optimal, keterbatasan kompetensi appraisal, tekanan dari WP/PPAT untuk menurunkan NJOP	Internal	C	Objek pajak PBB-P2 dan BPHTB dinilai terlalu rendah	Pemerintah Daerah dan Bapenda

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		C / U C	Dampak	
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j	k	l
9	Sub Kegiatan : Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	Perencanaan	Risiko Operasional : kelalaian petugas dalam penetapan wajib pajak Risiko Operasional : keterlambatan pembaruan data wajib pajak Risiko Fraud : data penetapan tidak sesuai pemeriksaan lapangan	petugas melakukan penetapan pajak lebih rendah dari kondisi sebenarnya	ROO.2 6.37.0 8.09	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Beban kerja terlalu berlebih dan diburu waktu sehingga petugas melakukan penetapan dengan terburu-buru, belum adanya sistem pembaruan data yang terintegrasi, manipulasi data oleh pihak-pihak yang punya akses namun tidak punya kontrol	Internal	c	Ketidaksesuaian database dapat mengganggu pendataan dan perhitungan potensi pajak	Bapenda, Pemerintah Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		C / U C	Dampak	
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j	k	l
								yang memadai				
10	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	persentase layanan dan konsultasi pajak daerah yang diselesaikan	Implementasi	Risiko Operasional : sikap petugas kurang ramah/tidak profesional Risiko Profesional : SOP pelayanan tidak dipatuhi oleh petugas pelayanan Risiko Sistem Dan TI : gangguan server/jaringan dalam melayani data WP	Petugas pelayanan belum melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan	ROO.2 6.37.0 8.10	Kabid Pelayanan dan Penagihan	Kurangnya pelatihan pelayanan publik (service excellent), petugas tidak memahami SOP secara lengkap, kapasitas server tidak memadai	Internal	C	Pelayanan pajak daerah terhambat	Bapenda, Pemerintah Daerah
11	Sub kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data	Jumlah laporan data pajak daerah yang telah dilakukan	Implementasi	Risiko Operasional : Data pelaporan pajak daerah	Wajib pajak tidak dapat menyampaikan data pelaporan	ROO.2 6.37.0 8.11	Kabid Pengawas	Masih rendahnya kepatuhan wajib	Internal dan Eksternal	C	Laporan realisasi anggaran menjadi	Bapenda, Pemerintah Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		C / U C	Dampak	
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Pelaporan Pajak Daerah	penelitian dan verifikasi		tidak lengkap atau terlambat Risiko Operasional : keterlambatan penyajian LRA	pajak daerah beserta pendukungnya sesuai batas waktu dan LRA tidak dapat disajikan sesuai jadwal pelaporan Bapenda		an dan Pelaporan	pajak, proses reviu lama karena adanya pembayaran yang belum terdeteksi berdasarkan rekening di bank			kurang akurat, jadwal pelaporan utamanya untuk mengampil keputusan menjadi terganggu	
1 2	Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Implementasi	Risiko Operasional : penagihan tidak dilakukan sesuai jadwal Risiko Operasional : koordinasi lemah antara bidang penetapan dengan bidang penagihan dan bidang	Petugas tidak melakukan penagihan sesuai SOP Penagihan	ROO.2 6.37.0 8.12	Kabid Pelayanan dan Penagihan	Keterbatasan jumlah petugas penagihan dan kondisi lapangan sehingga kunjungan tidak dapat mencakup semua WP tepat waktu, kurang koordiansi	Internal	C	Target pajak daerah tidak tercapai sekaligus bertambahnya piutang daerah	Bapenda, Pemerintah Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		C / U C	Dampak	
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j	k	l
				pengawasan dan pelaporan sehingga data piutang tidak sinkron Risiko Fraud : WP memberikan imbalan ke petugas penagihan agar penagihan dihentikan				antar bidang, pengawasan atasan lemah				
13	Sub Kegiatan : Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Implementasi	Risiko Operasional : keterbatasan SDM penelaah keberatan Risiko Operasional : waktu penyelesaian keberatan tidak tepat waktu Risiko Sistem Dan TI :	petugas tidak menjalankan prosedur keberatan sesuai SOP	ROO.2 6.37.0 8.13	Kabid Pelayanan dan Penagihan	Jumlah pegawai yang menangani keberatan sangat sedikit dibandingkan dengan beban kerjanya, alur kerja tidak	Internal dan Eksternal	C	Berkas keberatan tidak segera terselesaikan	Bapenda, Pemerintah Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		C / U C	Dampak	
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j	k	l
				gangguan sistem informasi pajak saat butuh data WP				efisien atau volume berkas keberatan tinggi, jaringan tidak stabil				
14	Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Pengawasan dan Pemeriksaan	Risiko Operasional : keterbatasan kompetensi pemeriksa dalam memeriksa tanpa berbasis risiko Risiko Operasional : prosedur pemeriksaan tidak diterapkan secara baik Risiko Fraud : kegiatan pemeriksaan	Petugas menyusun daftar wajib pajak yang akan diperiksa tanpa analisis risiko yang memadai	ROO.2 6.37.0 8.14	Kabid Pengawasan dan Pelaporan	belum adanya pelatihan khusus pemerisa berbasis risiko,SOP pemeriksaa n tidak dipahami secara menyeluruh oleh petugas,integritas pemeriksa lemah/ <i>moral hazard</i>	Internal	C	Pemeriksaan pajak daerah terhambat dan tidak menyeluruh sehinggakehilangan potensi penerimaan pajak daerah	Bapenda, Pemerintah Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		C / U C	Dampak	
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j	k	l
				hanya formalitas tidak secara mendalam dan terperinci								
15	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Pengawasan	<p>Risiko Operasional : tarif retribusi tidak diupdate dan aset retribusi belum diappraisal secara rutin</p> <p>Risiko Operasional : lemahnya pengawasan retribusi daerah</p> <p>Risiko Fraud : tidak terdeteksi potensi objek retribusi yang seharusnya dilaporkan ke daerah</p>	petugas kurang berkoordinasi dengan opd penghasil dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi daerah	ROO.2 6.37.0 8.15	Kabid dan Pengawasan Pelaporan	OPD Penghasil belum mengevaluasi tarif retribusi daerah dengan melihat perkembangan ekonomi, kurangnya koordinasi antara pemda dengan opd penghasil dalam penyampaian laporan	Internal dan Eksternal	C	Penerimaan retribusi daerah tidak optimal sehingga memengaruhi PAD keseluruhan	Bapenda, Pemerintah Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		C / U C	Dampak	
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Risiko Kemitraan : kurang transparansi dalam pelaporan realisasi retribusi daerah dalam proses rekonsiliasi setiap bulan				retribusi, kurangnya pengawasan lapangan dalam memantau potensi objek retribusi, kurangnya penggunaan sistem teknologi yang terintegrasi dalam sistem informasi pendapatan yang memadai untuk mendukung pelaporan dan				

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		C / U C	Dampak	
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j	k	l
								rekonsiliasi data				
16	Sub Kegiatan : Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Implementasi	Risiko Operasional : gangguan sistem pembayaran elektronik down/lemot sehingga transaksi tidak terecord Risiko Operasional :petugas kecamatan belum mahir menggunakan aplikasi pajak daerah Risiko Sistem & IT : serangan siber ke sistem perpajakan	petugas tidak memelihara sistem informasi pajak daerah sehingga ETPD belum optimal dilaksanakan	ROO.2 6.37.0 8.16	Kabid Perencanaan dan Evaluasi	Maintenance sistem tidak terjadwal, petugas baru tidak mendapat pelatihan memadai terkait sistem,penggunaan sistem enkripsi yang lemah, kurangnya pemahaman dan literasi digital	Internal	C	Kesadaran wajib pajak akan pembayaran digital masih rendah	Bapenda, Pemerintah Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		C / U C	Dampak	
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j	k	l
				daerah Risiko Operasional : wajib pajak menolak atau resistensi terhadap penggunaan TI dalam membayar pajak daerah								

C. Hasil Analisis Risiko

Berdasarkan pada matriks risiko strategis dan operasional di atas maka dapat dilakukan analisis terkait skala risiko yang akan dihadapi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan ke depan, adapun skala risiko serta penyebab dan dampak risiko dapat kami sajikan melalui tabel berikut :

SKALA RISIKO

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
Risiko Strategis OPD					
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum tercapai secara optimal	RSO.26.37.08.01	4	3	12
Risiko Operasional OPD					
1.	Risiko operasional: Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi daerah tidak tercapai tepat waktu	ROO.26.37.08.01	4	2	8
	Risiko fraud: penurunan kepatuhan wajib pajak		4	2	8
	Risiko Kebijakan: Perubahan kebijakan perpajakan baik dari tingkat pusat maupun daerah		3	2	6

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
2.	Risiko operasional: Belum tersusunnya kertas kerja proyeksi pendapatan	ROO.26.37.08.02	3	1	3
	Risiko Operasional : Ketidakselarasan target pajak dengan kebijakan regulasi nasional		2	1	2
	Risiko operasional : belum adanya sistem informasi terkait perencanaan pajak daerah		2	1	2
3.	Risiko operasional: data potensi pajak daerah tidak tersusun secara mutakhir	ROO.26.37.08.03	4	2	8
	Risiko Operasional: keterbatasan penyusunan / perubahan kebijakan pajak daerah dengan regulasi nasional		4	2	8

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
	Risiko Fraud: manipulasi data potensi/realisasi untuk menaikkan target		4	1	4
4.	Risiko Operasional: Sarana-prasarana & media publikasi penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan kurang memadai	ROO.26.37.08.04	3	2	6
	Risiko Operasional: partisipasi wajib pajak rendah		4	2	8
	Risiko Fraud: manipulasi laporan realisasi kegiatan		4	2	8
5.	Risiko Operasional: sarana IT pengelolaan pajak tidak sesuai kebutuhan	ROO.26.37.08.05	3	1	3
	Risiko Operasional: sistem IT pengelolaan pajak eror		4	1	4

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
	Risiko Operasional: Keamanan sarpras dan data pendukung kurang memadai		4	2	8
6.	Risiko Operasional: ada objek pajak tidak teridentifikasi	ROO.26.37.08.06	4	2	8
	Risiko Operasional: keterbatasan sarana dan SDM pendataan		3	2	6
	Risiko Fraud: manipulasi data objek pajak		4	1	4
7.	Risiko Operasional : kehilangan data karena terserang virus	ROO.26.37.08.07	4	1	4
	Risiko Operasional: monitoring kualitas data tidak rutin		4	2	8
	Risiko Fraud: rekayasa laporan basis data pajak		4	1	4
8.	Risiko Operasional: hasil penilaian NJOP tidak sesuai dengan harga pasar aktual	ROO.26.37.08.08	4	2	8
	Risiko Operasional: tidak adanya pembaruan zona nilai tanah secara rutin		4	3	12

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
	Risiko Fraud: kolusi petugas penilai dengan PPAT/Notaris dalam menentukan nilai objek		4	1	4
	Risiko Operasional: kelalaian petugas dalam penetapan wajib pajak		4	1	4
9.	Risiko Operasional: keterlambatan pembaruan data wajib pajak	ROO.26.37.08.09	4	1	4
	Risiko Fraud: data penetapan tidak sesuai pemeriksaan lapangan		4	1	4
	Risiko Operasional: sikap petugas kurang ramah/tidak profesional		4	1	4
10.	Risiko Profesional: SOP pelayanan tidak dipatuhi oleh petugas pelayanan	ROO.26.37.08.10	4	1	4
	Risiko Sistem Dan TI: gangguan server/jaringan dalam melayani data WP		4	1	4

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
11.	Risiko Operasional: Data pelaporan pajak daerah tidak lengkap atau terlambat	ROO.26.37.08.11	4	2	8
	Risiko Operasional: keterlambatan penyajian LRA		4	3	12
12.	Risiko Operasional: penagihan tidak dilakukan sesuai jadwal	ROO.26.37.08.12	4	3	12
	Risiko Operasional: koordinasi lemah antara bidang penetapan dengan bidang penagihan dan bidang pengawasan&pelaporan sehingga data piutang tidak sinkron		4	3	12
	Risiko Fraud: WP memberikan imbalan ke petugas penagihan agar penagihan dihentikan		4	1	4
13.	Risiko Operasional: keterbatasan SDM penelaah keberatan	ROO.26.37.08.13	3	2	6
	Risiko Operasional: waktu penyelesaian keberatan tidak tepat waktu		4	1	4
	Risiko Sistem Dan TI: gangguan sistem informasi pajak saat butuh data WP		4	1	4

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
14.	Risiko Operasional: keterbatasan kompetensi pemeriksa dalam memeriksa tanpa berbasis risiko	ROO.26.37.08.14	4	2	8
	Risiko Operasional: prosedur pemeriksaan tidak diterapkan secara baik		4	3	12
	Risiko Fraud : kegiatan pemeriksaan hanya formalitas tidak secara mendalam dan terperinci		4	2	8
15.	Risiko Operasional: tarif retribusi tidak diupdate dan asset retribusi belum diappraisal secara rutin	ROO.26.37.08.15	4	3	12
	Risiko Operasional: lemahnya pengawasan retribusi daerah		4	3	12
	Risiko Fraud: tidak terdeteksi potensi objek retribusi yang seharusnya dilaporkan ke daerah		4	2	8

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
	Risiko Kemitraan: kurang transparansi dalam pelaporan realisasi retribusi daerah dalam proses rekonsiliasi setiap bulan		4	2	8
16.	Risiko Operasional: gangguan sistem pembayaran elektronik down/lemot sehingga transaksi tidak ter- <i>record</i>	ROO.26.37.08.16	4	1	4
	Risiko Operasional: petugas kecamatan belum mahir menggunakan aplikasi pajak daerah		4	1	4
	Risiko Sistem & IT : serangan siber ke sistem perpajakan daerah		4	1	4
	Risiko Operasional : wajib pajak menolak atau resistensi terhadap penggunaan TI dalam membayar pajak daerah		4	1	4

MATRIKS ANALISIS RISIKO

MATRIKS ANALISIS RISIKO			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak Signifikan	Kecil	Besar	Sangat Signifikan
			1	2	3	4
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir Pasti	4				
	Kemungkinan Besar	3				RSO.26.37.08.01 ROO.26.37.08.08 ROO.26.37.08.11 ROO.26.37.08.12 ROO.26.37.08.12 ROO.26.37.08.14 ROO.26.37.08.15 ROO.26.37.08.15
	Kemungkinan Kecil	2			ROO.26.37.08.01 ROO.26.37.08.04 ROO.26.37.08.06 ROO.26.37.08.13	ROO.26.37.08.01 ROO.26.37.08.01 ROO.26.37.08.03 ROO.26.37.08.03 ROO.26.37.08.04 ROO.26.37.08.04 ROO.26.37.08.05 ROO.26.37.08.06 ROO.26.37.08.07 ROO.26.37.08.08 ROO.26.37.08.11 ROO.26.37.08.14 ROO.26.37.08.14 ROO.26.37.08.15 ROO.26.37.08.15
Sangat Jarang	1		ROO.26.37.08.02 ROO.26.37.08.02	ROO.26.37.08.02 ROO.26.37.08.05	ROO.26.37.08.03 ROO.26.37.08.05 ROO.26.37.08.06 ROO.26.37.08.07 ROO.26.37.08.07 ROO.26.37.08.08	

						ROO.26.37.08.09 ROO.26.37.08.09 ROO.26.37.08.09 ROO.26.37.08.10 ROO.26.37.08.10 ROO.26.37.08.10 ROO.26.37.08.12 ROO.26.37.08.13 ROO.26.37.08.13 ROO.26.37.08.16 ROO.26.37.08.16 ROO.26.37.08.16 ROO.26.37.08.16
--	--	--	--	--	--	---

Keterangan :

Sangat Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi
---------------	--------	--------	---------------

D. Pengendalian Yang Sudah Dilakukan

Berikut akan dijabarkan mengenai pengendalian yang sudah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan untuk mengendalikan risiko strategis dan risiko operasional yang telah diidentifikasi dan telah dilaksanakan yang dapat kami jabarkan ke dalam matriks tabel sebagai berikut :

Formulir Kertas Kerja Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Dinas : Badan Pendapatan Daerah
Tahun Penilaian : 2026
Tujuan Strategis Bapenda : Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
Urusan Pemerintahan : Keuangan dan Pendapatan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Badan Pendapatan Daerah:						
1	Penyusunan target PAD berbasis potensi pajak daerah dan PDRB, review triwulanan atas target vs realisasi pajak daerah, pemutakhiran basis data WP dan objek pajak secara berkala, penagihan dan pengawasan serta pemeriksaan secara aktif, memaksimalkan ETPD.	Rapat Koordinasi	Kepala Badan	Februari, April, Juli, Oktober, Desember 2026	Februari, April, Juli, Oktober, Desember 2026	Sedang dilaksanakan
Risiko Operasional OPD Badan Pendapatan Daerah:						
1	Membuat perencanaan target pajak daerah dan membuat jadwal penagihan dan pelaporan untuk memastikan tercapainya target pada waktu yang tepat, berikan insentif atau pengurangan pajak bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu, sosialisasi kebijakan dengan baik	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi, Rapat Evaluasi	Kepala Bidang-Bidang	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan
2	Menyusun kertas kerja potensi pendapatan berdasarkan potensi per jenis pajak, PDRB, membentuk tim kecil pemantau regulasi nasional	Rapat Koordinasi, Surat Menyurat	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Februari 2026	Februari 2026	Sedang dilaksanakan
3	Mengembangkan database pajak berintegrasi, pelatihan teknis analisis pajak dan ekonomi daerah, adanya tim teknis pemahaman regulasi nasional dengan kebijakan daerah	Rapat Koordinasi, Sosialisasi pelatihan	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan
4	Sosialisasi kebijakan pajak daerah secara menyeluruh secara masif baik melalui offline maupun melalui media sosial	Surat Menyurat, Rapat Koordinasi	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan
5	Optimalisasi pemanfaatan sarpras pelayanan pajak daerah yang sudah ada untuk mendukung layanan pajak menjadi baik	Surat Menyurat, Rapat Koordinasi, Rapat Evaluasi	Kabid Pelayanan dan Penagihan	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan
6	Melakukan update database pajak secara berkala	Rapat Koordinasi	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Maret, Juni, September, Desember 2026	Maret, Juni, September, Desember 2026	Sedang dilaksanakan
7	Menjaga keamanan dengan membuat sistem enkripsi database pajak daerah yang kuat dan pemutakhiran data wajib pajak yang mutakhir	Surat Menyurat, Rapat Koordinasi	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
8	Menetapkan jadwal pembaruan ZNT berbasis digitalisasi minimal setiap 2-3 tahun atau lebih cepat	Rapat Koordinasi dan Rapat Evaluasi	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Januari 2026	Januari 2026	Sedang dilaksanakan
9	Update data wajib pajak dan potensinya secara berkala	Rapat Koordinasi dan Rapat Evaluasi	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Maret, Juni, September, Desember 2026	Maret, Juni, September, Desember 2026	Sedang dilaksanakan
10	Memasifkan pelayanan berbasis digital	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kabid Pelayanan dan Penagihan	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan
11	Intensifikasi penggunaan WA <i>Blast</i> sebagai reminder pelaporan pajak daerah, sosialisasi kepada wajib pajak, adanya rekonsiliasi rutin setiap bulan	Rapat Koordinasi dan Rapat Rekonsiliasi	Kabid Pengawasan dan Pelaporan	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan
12	Pelaksanaan penagihan aktif didukung dengan SDM berkualitas dan upaya penegakan kepatuhan dengan bantuan APH	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kabid Pelayanan dan Penagihan	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan
13	Membuat digitalisasi sistem penanganan keberatan pajak daerah	Surat Menyurat, Rapat Koordinasi, Rapat Evaluasi	Kabid Pelayanan dan Penagihan	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan
14	Rapat penentuan sasaran wajib pajak pengawasan dan pemeriksaan	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kabid Pengawasan dan Pelaporan	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan
15	Rekonsiliasi Bulanan/Triwulan antara Bapenda dengan OPD penghasil dan membuat sistem Pendapatan Asli Daerah yang terintegrasi agar bisa melihat data retribusi secara <i>real time</i>	Rapat Koordinasi dan Rapat Rekonsiliasi	Kabid dan Pengawasan Pelaporan	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan
16	Membuat sistem pembayaran yang efisien dan efektif dan pendekatan yang komunikatif terutama kepada masyarakat desa tentang urgensi pembayaran digital pajak daerah	Rapat Koordinasi, Sosialisasi	Kabid Perencanaan dan Evaluasi	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Adapun rencana tindak pengendalian (RTP) terhadap risiko di poin b yang berisi jenis risiko, risiko, kode risiko, uraian pengendalian yang sudah ada, celah pengendalian, rencana tindak pengendalian, pemilik/penanggung jawab, serta target waktu penyelesaian risiko yang dihadapi dapat dijelaskan melalui matriks formulis kertas kerja sebagai berikut :

Formulir Kertas Kerja

Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan

Badan Pendapatan Daerah

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian : 2026

Tujuan Strategis OPD : Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

Urusan Pemerintah : Keuangan dan Pendapatan

Dinas : Badan Pendapatan Daerah

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis OPD Badan Pendapatan Daerah:							
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum tercapai secara optimal	RSO.26.37.08.0 1	Penyusunan target PAD berbasis potensi pajak daerah dan PDRB, review triwulanan atas target vs realisasi pajak daerah, pemutakhiran basis data WP dan objek pajak secara berkala, penagihan dan pengawasan serta pemeriksaan secara aktif, memaksimalkan ETPD	Penyusunan target belum sepenuhnya benar-benar berbasis potensi dan PDRB, tetapi masih dipengaruhi oleh tren pajak tahun-tahun lalu, penagihan dan pemeriksaan belum sepenuhnya berbasis risiko	Melaksanakan pemetaan potensi pajak secara berkala, melakukan kajian proyeksi pendapatan setiap tahun	Kepala Badan	Januari-Maret 2026
Risiko Operasional OPD Badan Pendapatan Daerah:							
1	<p>Risiko operasional: Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi daerah tidak tercapai tepat waktu</p> <p>Risiko fraud: Penurunan kepatuhan wajib pajak</p> <p>Risiko Kebijakan: Perubahan kebijakan perpajakan baik dari tingkat pusat maupun daerah</p>	ROO.26.37.08.0 1	Membuat perencanaan target pajak daerah dan membuat jadwal penagihan dan pelaporan untuk memastikan tercapainya target pada waktu yang tepat, berikan insentif atau pengurangan pajak bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu, sosialisasi kebijakan dengan baik	Ketidakakuratan dalam memproyeksikan target pendapatan pajak dan retribusi, informasi yang tidak efektif dan kurangnya penjangkauan ke masyarakat	Menggunakan data proyeksi pajak daerah berdasarkan kertas kerja proyeksi dan potensi, penyuluhan kebijakan dan pengimplementasian kebijakan secara terstruktur	Kepala Bidang-Bidang	Maret, Juni, September, Desember 2026
2	Risiko operasional: Belum tersusunnya kertas kerja proyeksi pendapatan	ROO.26.37.08.0 2	Menyusun kertas kerja potensi pendapatan berdasarkan potensi per jenis	belum dilakukan pelatihan penyusunan proyeksi dan	Membangun data potensi per jenis pajak dan menyusun pedoman kertas kerja potensi	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Desember 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	<p>Risiko Operasional : Ketidakselarasan target pajak dengan kebijakan regulasi nasional</p> <p>Risiko operasional : belum adanya sistem informasi terkait perencanaan pajak daerah</p>		pajak, PDRB, membentuk tim kecil pemantau regulasi nasional	analisis potensi			
3	<p>Risiko operasional: data potensi pajak daerah tidak tersusun secara mutakhir</p> <p>Risiko Operasional: keterbatasan penyusunan/perubahan kebijakan pajak daerah dengan regulasi nasional</p> <p>Risiko Fraud: manipulasi data potensi/realisasi untuk menaikkan target</p>	ROO.26.37.08.03	Mengembangkan database pajak berintegrasi, pelatihan teknis analisis pajak dan ekonomi daerah, adanya tim teknis pemahaman regulasi nasional dengan kebijakan daerah	Backup database dan pengamanan siber belum optimal	Membuat sistem enkripsi yang memadai dan melakukan pemeliharaan sistem database secara berkala	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Januari-Desember 2026
4	<p>Risiko Operasional: Sarana-prasarana & media publikasi penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan kurang memadai</p> <p>Risiko Operasional: partisipasi wajib pajak rendah</p> <p>Risiko Fraud: manipulasi laporan realisasi kegiatan</p>	ROO.26.37.08.04	Sosialisasi kebijakan pajak daerah secara menyeluruh secara masif baik melalui offline maupun melalui media sosial	Belum ada strategi sosialisasi yang terencana dan terstruktur	membuat strategi konten yang terstruktur dan strategis	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Januari-Desember 2026
5	<p>Risiko Operasional: sarana IT pengelolaan pajak tidak sesuai kebutuhan</p> <p>Risiko Operasional: sistem IT pengelolaan pajak eror</p> <p>Risiko Operasional: Keamanan sarpras dan data pendukung kurang memadai</p>	ROO.26.37.08.05	Optimalisasi pemanfaatan sarpras pelayanan pajak daerah yang sudah ada untuk mendukung layanan pajak menjadi baik	arpras pajak daerah tidak terinventarisir dengan baik	Melakukan maintenance sarpras pelayanan pajak daerah secara berkala	Kabid Pelayanan dan Penagihan	Januari-Desember 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
6	Risiko Operasional: ada objek pajak tidak teridentifikasi	ROO.26.37.08.06	Melakukan update database pajak secara berkala	Tenaga teknis pendataan tidak memadai	Menyediakan fitur untuk koreksi/pembaruan data oleh petugas lapangan/WP secara mandiri dengan otorisasi dan mengusulkan penambahan tenaga teknis pendataan pajak	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Maret, Juni, September, Desember 2026
	Risiko Operasional: keterbatasan sarana dan SDM pendataan						
	Risiko Fraud: manipulasi data objek pajak						
7	Risiko Operasional: kehilangan data karena terserang virus	ROO.26.37.08.07	Menjaga keamanan dengan membuat sistem enkripsi database pajak daerah yang kuat dan pemutakhiran data wajib pajak yang mutakhir	Tidak adanya backup database pajak daerah	Penetapan jadwal backup database pajak secara otomatis	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Maret, Juni, September, Desember 2026
	Risiko Operasional: monitoring kualitas data tidak rutin						
	Risiko Fraud: rekayasa laporan basis data pajak						
8	Risiko Operasional: hasil penilaian NJOP tidak sesuai dengan harga pasar aktual	ROO.26.37.08.08	Menetapkan jadwal pembaruan ZNT berbasis digitalisasi minimal setiap 2-3 tahun atau lebih cepat	Minimnya sistem digital untuk pemetaan dan penilaian ZNT	Mengembangkan sistem berbasis GIS atau sistem informasi pajak yang mampu memetakan nilai tanah secara spasial dan dinamis	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Februari 2026
	Risiko Operasional: tidak adanya pembaruan zona nilai tanah secara rutin						
	Risiko Fraud: kolusi petugas penilai dengan PPAT/Notaris dalam menentukan nilai objek						
9	Risiko Operasional: kelalaian petugas dalam penetapan wajib pajak	ROO.26.37.08.09	Update data wajib pajak dan potensinya secara berkala	Basis data WP belum terintegrasi dengan data eksternal seperti Dukcapil, DJP, BPN	Perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Dukcapil, BPN untuk proses tukar data	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Januari-Maret 2026
	Risiko Operasional: keterlambatan pembaruan data wajib pajak						
	Risiko Fraud: data penetapan tidak sesuai pemeriksaan lapangan						
10	Risiko Operasional: sikap petugas kurang ramah/tidak profesional	ROO.26.37.08.10	Memasifkan pelayanan berbasis digital	Resistensi terhadap digitalisasi perpajakan	Menunjuk agen perubahan di tiap UPT dan Menyelenggarakan pelatihan literasi digital dalam penggunaan aplikasi pajak	Kabid Pelayanan dan Penagihan	Januari-Desember 2026
	Risiko Profesional: SOP pelayanan tidak dipatuhi oleh petugas pelayanan						
	Risiko Sistem Dan TI: gangguan server/jaringan dalam melayani data WP						
11	Risiko Operasional: Data pelaporan pajak	ROO.26.37.08.11	Intensifikasi penggunaan WA	Reminder yang tidak rutin,	SOP dan penegakan sanksi bertahap	Kabid Pengawasan	Maret, Juni, September,

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	daerah tidak lengkap atau terlambat Risiko Operasional: keterlambatan penyajian LRA		Blast sebagai reminder wajib pajak dalam pelaporan pajak daerah, sosialisasi kepada wajib pajak, adanya rekonsiliasi rutin setiap bulan	sosialisasi minim, rekonsiliasi tidak dilakukan kepada keseluruhan jenis pajak daerah	dengan menggandeng pihak APH, menyiapkan SDM tambahan	dan Pelaporan	Desember 2026
12	Risiko Operasional: penagihan tidak dilakukan sesuai jadwal Risiko Operasional: koordinasi lemah antara bidang penetapan dengan bidang penagihan dan bidang pengawasan & pelaporan sehingga data piutang tidak sinkron Risiko Fraud: WP memberikan imbalan ke petugas penagihan agar penagihan dihentikan	ROO.26.37.08.1 2	Pelaksanaan penagihan aktif didukung dengan SDM berkualitas dan upaya penegakan kepatuhan dengan bantuan APH	Belum ada standar kompetensi dan sertifikasi juru penagihan	Mengadakan diklat juru penagihan	Kabd Pelayanan dan Penagihan	Januari-Desember 2026
13	Risiko Operasional: keterbatasan SDM penelaah keberatan Risiko Operasional: waktu penyelesaian keberatan tidak tepat waktu Risiko Sistem Dan TI: gangguan sistem informasi pajak saat butuh data WP	ROO.26.37.08.1 3	Membuat digitalisasi sistem penanganan keberatan pajak daerah	kurang adanya SDM terampil dalam menangani keberatan pajak daerah	membuat pelatihan SDM terkait keberatan pajak daerah	Kabid Pelayanan dan Penagihan	Januari-Desember 2026
14	Risiko Operasional: keterbatasan kompetensi pemeriksa dalam memeriksa tanpa berbasis risiko Risiko Operasional: prosedur pemeriksaan tidak diterapkan secara baik Risiko Fraud: kegiatan pemeriksaan hanya formalitas tidak secara mendalam dan terperinci	ROO.26.37.08.1 4	Rapat penentuan sasaran wajib pajak pengawasan dan pemeriksaan	Belum adanya scoring risiko dan prioritas yang terukur	Menyusun dan menerapkan risk scoring WP (omzet, histori ketidakpatuhan, sektor usaha) sebagai dasar sasaran pengawasan dan pemeriksaan	Kabid Pengawasan dan Pelaporan	Januari-Desember 2026
	Risiko Operasional: tarif retribusi tidak	ROO.26.37.08.1 5	Rekonsiliasi Bulanan/Triwulana	Rekonsiliasi belum diikuti	Berdiskusi dua arah untuk mengatasi akar	Kabid Pengawasan	Maret, Juni, September,

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
15	diupdate dan asset retribusi belum diappraisal secara rutin		n antara Bapenda dengan OPD penghasil dan membuat sistem Pendapatan Asli Daerah yang terintegrasi agar bisa melihat data retribusi secara real time	analisis gap dan akar masalah per OPD, Belum ada rencana pembinaan spesifik untuk OPD penghasil yang tidak optimal dalam mencapai target, anggaran pengembangan sistem informasi yang terbatas untuk membiayai produk dan SDM pengelola sistem IT	masalah dalam memungut retribusi daerah dan rencana perbaikan dalam penyesuaian tarif objek retribusi dan appraisal aset per OPD penghasil, menghindari pemborosan biaya dalam perekrutan SDM tetap dengan memanfaatkan layanan pihak ketiga secara efisien dan hanya untuk kebutuhan dalam pengembangan sistem informasi saja	dan Pelaporan	Desember 2026
	Risiko Operasional: lemahnya pengawasan retribusi daerah						
	Risiko Fraud: tidak terdeteksi potensi objek retribusi yang seharusnya dilaporkan ke daerah						
	Risiko Kemitraan: kurang transparansi dalam pelaporan realisasi retribusi daerah dalam proses rekonsiliasi setiap bulan						
16	gangguan sistem pembayaran elektronik down/lemot sehingga transaksi tidak ter-record	ROO.26.37.08.16	Membuat sistem pembayaran yang efisien dan efektif dan pendekatan yang komunikatif terutama kepada masyarakat desa tentang urgensinya pembayaran digital pajak daerah	Tidak disediakan helpdesk atau tim pendamping dari bapenda yang aktif mendampingi selama sistem diterapkan	Menyediakan SDM Bapenda di bidang IT untuk mendampingi dalam membantu masyarakat dalam pembayaran digital	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Januari-Desember 2026
	Risiko Operasional: petugas kecamatan belum mahir menggunakan aplikasi pajak daerah						
	Risiko Sistem & IT : serangan siber ke sistem perpajakan daerah						
	Risiko Operasional : wajib pajak menolak atau resistensi terhadap penggunaan TI dalam membayar pajak daerah						

BAB IV

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Kesuksesan pengendalian risiko startegis dan operasional OPD salah satunya dipengaruhi oleh faktor informasi dan komunikasi. Faktor informasi dan komunikasi diperlukan dalam penyampaian risiko strategis dan operasional serta rencana tindak pengendalian dalam menangani terjadinya risiko dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan. Berikut akan dijabarkan mengenai rancangan informasi dan komunikasi yang telah disusun oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan ke dalam matriks sebagai berikut :

Formulir Kertas Kerja

Pengkomunikasian Pengendalian yang Dibangun

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	: 2026
Tujuan Strategis OPD	: Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
Urusan Pemerintah	: Keuangan dan Pendapatan
Dinas	: Badan Pendapatan Daerah

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Badan Pendapatan Daerah:							
1	Melaksanakan pemetaan potensi pajak secara berkala, melakukan kajian proyeksi pendapatan setiap tahun	Rapat koordinasi	Kepala Badan	Pegawai Baoenda	Januari-Maret 2026	Januari-Maret 2026	Sedang dilaksanakan
Risiko Operasional OPD Badan Pendapatan Daerah:							
1	Menggunakan data proyeksi pajak daerah berdasarkan kertas kerja proyeksi dan potensi, penyuluhan kebijakan dan pengimplementasian kebijakan secara terstruktur	Nota dinas, rapat koordinasi, rapat evaluasi	Kepala Bidang-Bidang	Pegawai Baoenda	Maret, Juni, September, Desember 2026	Maret, Juni, September, Desember 2026	Sedang dilaksanakan
2	Membangun data potensi per jenis pajak dan menyusun pedoman kertas kerja potensi	Surat undangan, rapat koordinasi, kertas kerja	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Pegawai Bapenda	Desember 2026	Desember 2026	Sedang dilaksanakan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
3	Membuat sistem enkripsi yang memadai dan melakukan pemeliharaan sistem database secara	Rapat koordinasi,rapat evaluasi	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Pegawai IT Bapenda	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan
4	Membuat strategi konten yang terstruktur dan strategis	Rapat koordinasi	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Wajib Pajak	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan
5	Melakukan <i>maintenance</i> sarpras pelayanan pajak daerah secara berkala	Rapat koordinasi	Kabid Pelayanan dan Penagihan	Pegawai Bapenda	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan
6	Menyediakan fitur untuk koreksi/pembaruan data oleh petugas lapangan/WP secara mandiri dengan otoriasi dan mengusulkan penambahan tenaga teknis pendataan pajak	Rapat koordinasi, surat menyurat	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Pegawai Bapenda/Wajib Pajak	Maret, Juni, September, Desember 2026	Maret, Juni, September, Desember 2026	Sedang dilaksanakan
7	Penetapan jadwal backup database pajak secara otomatis	Rapat koordinasi	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Pegawai Bapenda	Maret, Juni, September, Desember 2026	Maret, Juni, September, Desember 2026	Sedang dilaksanakan
8	Mengembangkan sistem berbasis GIS atau sistem informasi pajak yang mampu memetakan nilai tanah secara spasial dan dinamis	Rapat koordinasi	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Pegawai Bapenda	Februari 2026	Februari 2026	Sedang dilaksanakan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
9	Perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Dukcapil, BPN untuk proses tukar data	Rapat koordinasi dan surat menyurat	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Pihak mitra Bapenda (Direktorat Jenderal Pajak dan Dukcapil, BPN)	Januari-Maret 2026	Januari-Maret 2026	Sedang dilaksanakan
10	Menunjuk agen perubahan di tiap UPT dan Menyelenggarakan pelatihan literasi digital dalam penggunaan aplikasi pajak	Rapat koordinasi dan surat menyurat	Kabid Pelayanan dan Penagihan	Pegawai Bapenda	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan
11	SOP dan penegakan sanksi bertahap dengan menggandeng pihak APH, menyiapkan SDM tambahan	Rapat koordinasi dan surat menyurat	Kabid Pengawasan dan Pelaporan	Wajib Pajak	Maret, Juni, September, Desember 2026	Maret, Juni, September, Desember 2026	Sedang dilaksanakan
12	Mengadakan diklat juru penagihan	Rapat koordinasi dan surat menyurat	Kabd Pelayanan dan Penagihan	Pegawai Bapenda	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan
13	Membuat pelatihan SDM terkait keberatan pajak daerah	Rapat koordinasi dan surat menyurat	Kabid Pelayanan dan Penagihan	Pegawai Bapenda	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan
14	Menyusun dan menerapkan risk scoring WP (omzet, histori ketidakpatuhan, sektor usaha) sebagai dasar sasaran pengawasan dan pemeriksaan	Rapat koordinasi dan rapat evaluasi	Kabid Pengawasan dan Pelaporan	Pegawai Bapenda dan Wajib Pajak	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
15	Berdiskusi dua arah untuk mengatasi akar masalah dalam memungut retribusi daerah dan rencana perbaikan dalam penyesuaian tarif objek retribusi dan appraisal aset per OPD penghasil, menghindari pemborosan biaya dalam perekrutan SDM tetap dengan memanfaatkan layanan pihak ketiga secara efisien dan hanya untuk kebutuhan dalam pengembangan sistem informasi saja	Rapat koordinasi dan rapat evaluasi	Kabid Pengawasan dan Pelaporan	OPD Penghasil	Maret, Juni, September, Desember 2026	Maret, Juni, September, Desember 2026	Sedang dilaksanakan
16	Menyediakan SDM Bapenda di bidang IT untuk mendampingi dalam membantu masyarakat dalam pembayaran digital	Rapat koordinasi	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Pegawai IT Bapenda	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan

BAB V

RANCANGAN PEMANTAUAN

Pengendalian dan pemantauan risiko merupakan salah satu faktor dalam penentuan keberhasilan sebuah organisasi dalam pelaksanaan tugas serta pencapaian target dan kinerja organisasi perangkat daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana tugas dalam urusan pendapatan daerah, guna mengendalikan dan menghadapi risiko-risiko yang diidentifikasi dalam pencapaian tujuan organisasi maka disusun sebuah rancangan pemantauan yang dapat kami jabarkan melalui matriks tabel sebagaimana berikut :

Formulir Kertas Kerja

Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Dinas : Badan Pendapatan Daerah
 Tahun Penilaian : 2026
 Tujuan Strategis Bapenda : Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
 Urusan Pemerintahan : Keuangan dan Pendapatan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Badan Pendapatan Daerah:						
1	Melaksanakan pemetaan potensi pajak secara berkala, melakukan kajian proyeksi pendapatan setiap tahun	Rapat Koordinasi	Kepala Badan	Februari, April, Juli, Oktober, Desember 2026	Februari, April, Juli, Oktober, Desember 2026	Sedang dilaksanakan
Risiko Operasional OPD Badan Pendapatan Daerah:						
1	Menggunakan data proyeksi pajak daerah berdasarkan kertas kerja proyeksi dan potensi, penyuluhan kebijakan dan pengimplementasian kebijakan secara terstruktur	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi, Rapat Evaluasi	Kepala Bidang-Bidang	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan
2	Membangun data potensi per jenis pajak dan menyusun pedoman kertas kerja potensi	Rapat Koordinasi, Surat Menyurat	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Februari 2026	Februari 2026	Sedang dilaksanakan
3	Membuat sistem enkripsi yang memadai dan melakukan pemeliharaan sistem database secara	Rapat Koordinasi, Sosialisasi pelatihan	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan
4	Membuat strategi konten yang terstruktur dan strategis	Surat Menyurat, Rapat Koordinasi	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan
5	Melakukan <i>maintenance</i> sarpras pelayanan pajak daerah secara berkala	Surat Menyurat, Rapat Koordinasi, Rapat Evaluasi	Kabid Pelayanan dan Penagihan	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan
6	Menyediakan fitur untuk koreksi/pembaruan data oleh petugas lapangan/WP secara mandiri dengan otorisasi dan mengusulkan penambahan tenaga teknis pendataan pajak	Rapat Koordinasi	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Maret, Juni, September, Desember 2026	Maret, Juni, September, Desember 2026	Sedang dilaksanakan
7	Penetapan jadwal backup database pajak secara otomatis	Surat Menyurat, Rapat Koordinasi	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan
8	Mengembangkan sistem berbasis	Rapat	Kabid	Januari 2026	Januari 2026	Sedang

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	GIS atau sistem informasi pajak yang mampu memetakan nilai tanah secara spasial dan dinamis	Koordinasi dan Rapat Evaluasi	Perencanaan dan Penetapan			dilaksanakan
9	Perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Dukcapil, BPN untuk proses tukar data	Rapat Koordinasi dan Rapat Evaluasi	Kabid Perencanaan dan Penetapan	Maret, Juni, September, Desember 2026	Maret, Juni, September, Desember 2026	Sedang dilaksanakan
10	Menunjuk agen perubahan di tiap UPT dan Menyelenggarakan pelatihan literasi digital dalam penggunaan aplikasi pajak	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kabid Pelayanan dan Penagihan	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan
11	SOP dan penegakan sanksi bertahap dengan menggandeng pihak APH, menyiapkan SDM tambahan	Rapat Koordinasi dan Rapat Rekonsiliasi	Kabid Pengawasan dan Pelaporan	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan
12	Mengadakan diklat juru penagihan	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kabid Pelayanan dan Penagihan	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan
13	Membuat pelatihan SDM terkait keberatan pajak daerah	Surat Menyurat, Rapat Koordinasi, Rapat Evaluasi	Kabid Pelayanan dan Penagihan	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan
14	Menyusun dan menerapkan risk scoring WP (omzet, histori ketidakpatuhan, sektor usaha) sebagai dasar sasaran pengawasan dan pemeriksaan	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kabid Pengawasan dan Pelaporan	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan
15	Berdiskusi dua arah untuk mengatasi akar masalah dalam memungut retribusi daerah dan rencana perbaikan dalam penyesuaian tarif objek retribusi dan appraisal aset per OPD penghasil, menghindari pemborosan biaya dalam perekrutan SDM tetap dengan memanfaatkan layanan pihak ketiga secara efisien dan hanya untuk kebutuhan dalam pengembangan sistem informasi saja	Rapat Koordinasi dan Rapat Rekonsiliasi	Kabid dan Pengawasan Pelaporan	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan
16	Menyediakan SDM Bapenda di bidang IT untuk mendampingi dalam membantu masyarakat dalam pembayaran digital	Rapat Koordinasi, Sosialisasi	Kabid Perencanaan dan Evaluasi	Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Sedang dilaksanakan

BAB VI

PENUTUP

Dari hasil yang telah dijabarkan di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan telah menyusun dokumen dalam pengelolaan risiko sesuai dengan kaidah dan semoga dokumen penilaian risiko tahun 2026 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai panduan dalam identifikasi, pemantauan, pengendalian risiko dalam pencapaian tujuan dan sasaran dalam urusan pendapatan daerah di Kabupaten Lamongan.